

# PENERAPAN AKUNTANSI ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA NEGARA DAN PENGENDALIAN BIAYA DI BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS VISI NUSANTARA

Fitra Weli<sup>1</sup>, Didi<sup>2</sup>

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djuanda  
Bogor

Email : [fitrawelijaya555@gmail.com](mailto:fitrawelijaya555@gmail.com), [didi.fe@unida.ac.id](mailto:didi.fe@unida.ac.id)

---

## ABSTRAK

Laporan ini membahas mengenai penerapan akuntansi anggaran pendapatan, belanja negara dan pengendalian biaya di balai latihan kerja komunitas visi nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian biaya dalam penerapan akuntansi anggaran pendapatan, belanja negara, penerapan akuntansi dalam balai latihan kerja komunitas visi nusantara, mengetahui kendala dalam pengendalian dan penerapan akuntansi, pengendalian biaya merupakan langkah dan upaya yang strategis dalam penerapan akuntansi anggaran pendapatan, belanja negara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan cara pendekatan deskriptif yang memiliki tujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi anggaran pendapatan, belanja negara dan pengendalian biaya di balai latihan kerja komunitas visi nusantara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan akuntansi telah dilakukam dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang berlaku dengan point yang disebutkan dalam tujuan penelitian ini. Namun, dalam penerapan dan pengendalian biaya perlu ditingkatkan agar berjalan dengan optimal.

**Kata Kunci** : Penerapan, Anggaran Pendapatan, Belanja Negara, Pengendalian Biaya, BLK

## PENDAHULUAN

Anggaran pemerintah adalah instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara yang mencerminkan rencana dan prioritas pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Anggaran tersebut digunakan untuk mendanai program dan kegiatan, termasuk pelatihan kerja yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja. Salah satu lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran pemerintah yaitu untuk pelatihan kerja di Balai Kerja Latihan. Balai Latihan Kerja (BLK) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan non-formal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan keterampilan, kecakapan

hidup, dan usaha untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satu lembaga yang mendapat alokasi anggaran pemerintah untuk pelatihan kerja adalah Balai Latihan Kerja Komunitas Visi Nusantara.

Penerapan akuntansi anggaran pemerintah dalam pengelolaan belanja negara di Balai Latihan Kerja Komunitas Visi Nusantara sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat optimal. Akuntansi anggaran pemerintah melibatkan pencatatan, klasifikasi, dan pelaporan transaksi keuangan secara sistematis dan tepat waktu memungkinkan pengelola anggaran untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mengidentifikasi serta mengatasi penyimpangan.

Pengendalian biaya merupakan aspek krusial dalam pengelolaan anggaran dengan menerapkan teknik pengendalian biaya yang efektif di Balai Latihan Kerja Komunitas Visi Nusantara dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran, menghindari pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Pengendalian biaya melibatkan berbagai mekanisme, seperti pengawasan internal, audit berkala, dan analisis varians yang membantu dalam memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Penerapan akuntansi anggaran dan pengendalian biaya sering menghadapi berbagai tantangan. Beberapa diantaranya termasuk kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, sistem informasi yang belum memadai dan kompleksitas regulasi pemerintah, oleh karena itu diperlukan upaya terus – menerus untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelolaan anggaran.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis Menyusun Laporan Kuliah Kerja Lapang (KKL) ini dengan judul “PENERAPAN AKUNTANSI ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA NEGARA DAN PENGENDALIAN BIAYA DI BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS VISI NUSANTARA”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif, dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk bagaimana penerapan akuntansi dan pengendalian biaya pada anggaran pendapatan, belanja negara di Balai Latihan Kerja Komunitas Visi Nusantara.

Lokasi yang terdapat dalam penelitian ini berada di Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, data yang dimuat dalam penelitian ini berasal dari berbagai data baik itu dari pengelola BLK atau informan dan data berupa dokumen dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi observasi, wawancara serta dokumentasi. Untuk keakuratan data, mengacu pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja, pengendalian biaya yang dilakukan secara efisien dan efektif dengan cara membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pengeluaran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan akuntansi anggaran pendapatan, belanja negara**

Penerapan akuntansi anggaran pendapatan, belanja negara pada balai latihan kerja komunitas visi nusantara mengacu pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini sudah menerapkan akuntansi anggaran, belanja negara dengan peraturan yang berlaku. Menyusun rencana kerja anggaran yang telah dibuat diberikan kepada pemerintah provinsi untuk disetujui apabila disetujui akan dikeluarkan berupa dokumen yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Pelaksanaan anggaran akan dilakukan pada angkatan berikutnya atau pada tahun berikutnya, rencana anggaran dapat dilaksanakan dalam jangka waktu per triwulan.

Untuk melakukan belanja, khususnya belanja keperluan kegiatan pelatihan akan dibentuknya panitia pelaksana atau pembelian barang sesuai dengan prosedur yang telah diberlakukan, penerapan pembayaran belanja menggunakan mekanisme LS (pembayaran secara langsung kepada rekening).

Mekanisme belanja memiliki beberapa langkah, mulai dari pengajuan anggaran, pencairan anggaran dan sampai dengan pencatatan pembiayaan keperluan yang menghasilkan laporan keuangan. Berikut langkah – langkah penerapan akuntansi anggaran pendapatan dan belanja negara :

- A. Pengajuan Anggaran
- B. Pencairan Anggaran
- C. Pembelanjaan Peralatan Kegiatan
- D. Pembukuan dan Pelaporan

## 2. Pengendalian biaya yang dilakukan BLKK

Pengendalian biaya dapat melibatkan beberapa strategis untuk memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan , belanja negara. Setelah melakukan wawancara dengan pengelolaa BLK melakukan beberapa strategis dalam pengendalian biaya sebagai berikut :

### A. Pengendalian Operasional

Pengendalian operasional dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada seperti tenaga kerja, peralatan dan pengawasan dalam kegiatan pelatihan yang di rencanakan sesuai dengan rencana anggaran.

### B. Pengendalian Keuangan

Pengendalian keuangan dengan membuat anggaran yang rinci dan realistis untuk semua kegiatan pelatihan, agar anggaran ini harus mencakup semua aspek pembiayaan termasuk bahan pelatihan, honorarium instruktur, perawatan fasilitas, dan administrasi.

### C. Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan dan Pengembangan Pelatihan dan pengembangan dengan memberikan pelatihan kepada pegawai mengenai pemahaman akuntansi anggaran pendapatan dan belanja negara, manajemen biaya dan pengendalian keuangan serta meningkatkan kapasitas pegawai dalam mengelola dan

mengendalikan biaya operasional dalam mengimplementasikan praktik – praktik penghematan biaya.

D. Kerjasama dan Kolaborasi

Kerjasama dan Kolaborasi dengan membangun kemitraan dengan pihak lain seperti lembaga pendidikan, untuk berbagai sumber daya dan mengurangi biaya operasional.

E. Pengendalian Biaya

Pengendalian biaya merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan dilakukan secara efisien dan efektif. Dengan cara membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi pengeluaran serta memastikan bahwa anggaran yang dibuat realistis sehingga sesuai peraturan yang berlaku.

3. Kendala penerapan anggaran pendapatan, belanja negara

Balai latihan kerja komunitas visi nusantara mengalami beberapa kendala mengenai penerapan anggaran pendapatan, belanja negara sebagai berikut :

- A. Birokrasi dan Prosedur Administrasi, proses pencairan dana APBN seringkali memerlukan prosedur administrasi yang panjang dan rumit, keterlambatan dalam pencairan dana APBN dalam penyusunan laporan keuangan atau administrasi bisa menghambat pencairan dana berikutnya.
- B. Kapasitas SDM BLKK memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola dana APBN serta kurangnya pelatihan dan pengetahuan tentang tata kelola keuangan publik dikalangan BLKK Visi Nusantara.
- C. Koordinasi antar lembaga, kurangnya koordinator antara BLKK, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.
- D. Komitmen dan dukungan, kurangnya komitmen dari pihak terkait, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung program BLKK.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapang (KKL) di Balai Latihan Kerja Komunitas Visi Nusantara maka dapat diambil Kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan akuntansi APBN di Balai Latihan Kerja Komunitas Visi Nusantara telah dilakukan dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Sistem akuntansi yang digunakan mencakup pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi keuangan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemerintah. penerapan akuntansi telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa area yang memerlukan peningkatan seperti pemahaman sistem informasi akuntansi yang lebih mendalam dan penyediaan teknologi yang lebih memadai.
2. Pengendalian biaya yang dilakukan BLKK Visi Nusantara mampu memaksimalkan penggunaan APBN yang tersedia, memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan anggaran dengan realisasi anggaran serta terlibat seluruh struktur organisasi dalam proses pengelolaan anggaran dan juga pengawasan terhadap setiap transaksi keuangan.
3. Kendala Penerapan APBN BLKK Visi Nusantara kendala utama yang utama adalah keterbatasan pemahaman dan keterampilan dalam bidang akuntansi serta meliputi birokrasi dan prosedur administrasi, kapasitas SDM, koordinasi antar lembaga, komitmen dan dukungan. Untuk mengatasi diperlukan perencanaan yang matang, peningkatan kapasitas SDM, serta koordinasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait dalam pengelolaan dana juga harus diperkuat untuk memastikan keberhasilan program.

## SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kegiatan pelatihan semacam ini diharapkan ditingkatkan kualitas dan kuantitas baik dalam hal kegiatan maupun sumber dana sehingga dimasa yang akan datang para peserta BLK dapat ditingkatkan baik dari jumlah maupun kualitas yang dihasilkan dari pelatihan – pelatihan hasil tersebut.
2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai Balai Pelatihan Kerja.
3. Perlu adanya pengendalian biaya yang kuat untuk dana anggaran pendapatan dan belanja negara yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

## REFERENSI

- Bastian, Indra. 2010. **Akuntansi Sektor Publik** Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Brownell, P. (1982). **Participation in the Budgeting Process**: When it Works and When it Doesn't. *Journal of Accounting Literature*, 1, 124-153.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). *Internal Control - Integrated Framework*.
- Hansen, Don R. Dan Maryanne M. Mowen. (2006). **Akuntansi Manajemen**. Buku 2. Erlangga, Jakarta.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2006). *Cost Management: Accounting and Control*. South-Western College Pub.
- Husna, Nurhayatul.2015. **Evaluasi Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTDBL)**. Payakumbuh: Tesis Universitas Andalas
- Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2015). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. Pearson.
- Mardiasmo. 2009. **Akuntansi Sektor Publik**. Edisi keempat. ANDI.Yogyakarta
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga Negara
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN

Warrant dkk., 2005. *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Salemba Empat

Wiratna Sujarweni. 2015. **Akuntansi Sektor Publik**. Yogyakarta: Pustaka Baru Pres